

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan kepentingan anak untuk memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Putusan hakim anak yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, memiliki akibat putusan batal demi hukum. Masalah yang dirumuskan: 1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Hakim Anak yang tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon?; 2) Bagaimana nilai keadilan putusan hakim anak dalam mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon ?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologi. Data baik data sekunder maupun primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisa dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Akibat hukum dari putusan hakim anak yang tidak mempertimbangkan Hasil Litmas PK Bapas berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan hakim anak dinyatakan batal demi hukum, dan kebatalannya tidak memerlukan pembatalan; 2) Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan tidak membawa dampak positif untuk memberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak, ketika hakim menjadikannya hanya sebagai formalitas belaka bukan sebagai bahan pertimbangan putusannya. Dikemukakan saran: 1) Hendaknya diimplementasikan di dalam perubahan UU-SPPA dengan jelas sehingga Litmas PK Bapas tidak hanya dijadikan sebagai syarat formal hakim anak dalam menjatuhkan putusan; 2) Hendaknya dibentuk lembaga hakim pengawas yang bertugas untuk menilai bahwa putusan hakim anak dapat dinyatakan sebagai putusan yang batal demi hukum, dan hakim pengawaslah yang harus menetapkan bahwa terpidana anak tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan Hakim, Pidana Anak, Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan.

ABSTRACT

The juvenile justice system prioritizes the interests of children to obtain special protection. All activities of law enforcement officers carried out in the context of juvenile justice must be based on the welfare of the child and the interests of the child. The purpose of juvenile justice cannot be separated from the main objective of realizing child welfare which is basically an integral part of social welfare. The juvenile justice process, from the investigation to the imposition of sanctions and placing it in a correctional institution, must consider a community research report. Decisions of juvenile judges who do not consider the community supervisor's social research report, have the effect of the decision being null and void by law. Problems formulated: 1) What are the legal consequences of the decision of the Child Judge who does not consider the results of the Community Research (Litmas) Community Guidance (PK) in the Cirebon District Court ?; 2) What is the fair value of the decision of the juvenile judge in considering the Results of Community Guidance (Litmas) Community Guidance (PK) in the Cirebon District Court?. This research was conducted with a sociological juridical approach. Data both secondary and primary data are collected by means of literature study, document studies, and interviews. The data that has been collected is analyzed and presented descriptively analysis. The results of the study concluded: 1) The legal consequences of the decision of a juvenile judge who did not consider the Litmas PK Bapas Results based on Article 60 of the Law on the Criminal Justice System for the Child, the decision of the juvenile judge was declared null and void, and its cancellation did not require cancellation; 2) Community Research (Litmas) Community Guidance (PK) Penitentiary does not have a positive impact to provide fair and best decisions for children, when the judge makes it only as a mere formality and not as a consideration for the decision. Suggested suggestions: 1) It should be implemented clearly in the amendment of the UU-SPPA so that Bapas PK Litmas PK is not only used as a formal requirement for juvenile judges in making decisions; 2) A supervisory judge institution should be formed which is tasked with assessing that the decision of a juvenile judge can be declared a null and void decision, and the supervising judge must determine that a child convict cannot be executed by the Public Prosecutor.

Keywords: Due to the Law, Judge's Decision, Child Crimes, Community Research, Community Guidance